

IMPLIKASI PERUNDANG- UNDANGAN NO. 4 TAHUN 2023 TERKAIT DENGAN INDUSTRI KEUANGAN

**ARIAWAN GUNADI
INDAH SITI APRILIA
SUWINTO JOHAN**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

PENDAHULUAN

Presiden Joko Widodo telah menetapkan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).¹ Undang-Undang ini merupakan omnibus law industri keuangan. UU P2SK mencakup lima hal yakni penguatan kelembagaan otoritas keuangan, penguatan tata Kelola dan kepercayaan publik, mendorong pendanaan jangka panjang sektor keuangan untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan, perlindungan konsumen industri keuangan dan literasi, inklusi dan inovasi keuangan.² UU P2K terdiri dari 27 Bab dan 341 pasal yang menggantikan 17 Undang-Undang terkait dengan industri keuangan. Dari 17 Undang Undang, ada Undang Undang yang telah berlaku hingga 30 tahun.³

1 Wibi Pangestu Pratama, "Tok! Jokowi Sahkan RUU PPSK Jadi Undang-Undang," *Bisnis.Com*, 2023, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230113/9/1617972/tok-jokowi-sahkan-ruu-ppsk-jadi-undang-undang>.

2 Arnoldus Kristianus, "Presiden Sahkan RUU Penguatan Sektor Keuangan Jadi Undang-Undang," *Investor.Id*, 2023, <https://investor.id/macroeconomics/319035/presiden-sahkan-ruu-penguatan-sektor-keuangan-jadi-undangundang>.

3 Anisa Indraini, "Jokowi Sahkan Omnibus Law Sektor Keuangan, Gantikan 17 UU Lama," *Detik Finance*, 2023, <https://finance.detik.com/moneter/d-6514361/jokowi-sahkan-omnibus-law-sektor-keuangan-gantikan-17-uu-lama>.

UU P2SK mengandung beberapa kontroversi. Salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi satu-satunya pihak yang memiliki wewenang atas kepailitan dan PKPU lembaga jasa keuangan. Penelitian ini memiliki keunikan dengan membahas secara khusus terhadap wewenang OJK selaku pihak satu-satunya yang berhak mengajukan kepailitan lembaga jasa keuangan.

OJK dibentuk atas dasar banyaknya masalah lintas sektoral di industri keuangan. Masalah yang terjadi seperti ukuran, risiko etika, perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas industri keuangan secara keseluruhan⁴. OJK memiliki peranan mengawasi kegiatan industri keuangan agar dapat bertumbuh stabil dan berkelanjutan dan memperoleh kepercayaan masyarakat⁵.

Banyak lembaga jasa keuangan, terutama perusahaan asuransi mengalami bayar bayar. Hal ini telah menimbulkan keresahan masyarakat. Nasabah perusahaan asuransi berusaha memperoleh kompensasi atas gagal bayar perusahaan asuransi. Nasabah asuransi tidak dapat mengajukan kepailitan atas perusahaan asuransi berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011. Wewenang kepailitan perusahaan asuransi hanya dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan⁶. Asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar polis kepada

4 Nabilah Farah Diba, Hari Sutra Disemadi, and Paramita Prananingtyas, "Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18, no. 2 (2020): 868–876.

5 Muhammad Ridho, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)Abstract," *Jurnal Hukum Kaidab: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 19, no. 2 (2020): 292–328. The Financial Services Authority has the authority to submit bankrupt statements to insurance companies in order to protect the interests of insurance policy holders. The purpose of the research in this thesis is to analyze the authority of the Financial Services Authority in the insolvency of insurance companies, to analyze the legal protection of customers who are harmed by the insolvency statement of insurance company to analyze the legal considerations of judges in the Supreme Court's Decision No. 408 K/ Pdt. Sus-Pailit /2015. The research method used is descriptive analysis that leads to normative juridical research that is research conducted by referring to legal norms that is examining library materials or secondary materials, and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results showed that the Authority of the Financial Services Authority in the insolvency of insurance companies is based on the Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligation ('UU KKPU'

6 N Haryadi, "Analisis Kritis Mengenai Legal Standing Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Kresna Life Dalam Perspektif ...," *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan ...* 1, no. 2 (2021): 124–136, <http://journal.pppci.or.id/index.php/jurisandsociety/>

nasabahanya. Perusahaan Asuransi memiliki Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Perasuransian. Asuransi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sedangkan persyaratan kepailitan diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004⁷. OJK melalui dewan komisiner OJK dapat mengajukan permohonan kepailitan perusahaan asuransi ke pengadilan niaga untuk menghasilkan kepastian hukum dan keadilan hukum⁸. Namun, pengajuan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga dapat diajukan oleh dua nasabah yang dapat membuktikan klaimnya jatuh tempo. Keputusan penerimaan permohonan pailit ini tergantung pada keyakinan dan pengetahuan hakim, panitera dan pengadilan terkait⁹.

OJK memiliki fungsi melindungi nasabah dari berbagai permasalahan dengan lembaga keuangan, melalui pelayanan pengaduan konsumen. OJK akan memfasilitasi penyelesaian pengaduan nasabah¹⁰. Sengketa antara konsumen dengan lembaga keuangan telah terjadi di hampir semua lembaga jasa keuangan. Sengketa ini meliputi sengketa antara lembaga keuangan mikro dengan konsumen, sengketa di pasar modal berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal¹¹, sengketa lainnya antar profesi pendukung pasar modal dengan emiten pasar modal juga telah terjadi¹²

article/view/30%0Ahttps://journal.pppci.or.id/index.php/jurisandsociety/article/download/30/20.

- 7 N. K. J. D. Verayanthi and I. G. A Kurniawan, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Nasabah Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi," *Kerttha Semaya* 9, no. 8 (2021): 1465–1475. Internal Medicine, Cardiology, Vascular Surgery and Post Coronary Care. The data was obtained through the registration of patients enrolled in the program between November 2006 and April 2008. We analyzed sociodemographic variables (gender, age, reason for admission, the institution where hospitalized, hospital stay, primary care (PAC
- 8 Bionda Johan Anggara and Warsifah Warsifah, "Penerapan Hukum Kepailitan Dalam Kaitannya Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Institusi Pengatur Dan Pengawas Perusahaan Asuransi Negara (Contoh Kasus PT. Asuransi Jiwasraya)," *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 4 (2022): 1250–1259.
- 9 Alwi Alwi, "Tinjauan Yuridis Upaya Pengajuan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Oleh Nasabah Asuransi," *JUPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 7, no. 4 (2021): 722–728.
- 10 Aisyah Ayu Musyafah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Lan, Development and Justice Review* 2, no. 2 (2019): 194–211.
- 11 Suwinto Johan, Ariawan Ariawan, and Luo Yuan Yuan, "Insider Trading: Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1995 on Capital Market from Typewriters to Digital Era," *Jurnal Hukum Novelty* 13, no. 1 (2022): 13.
- 12 Suwinto Johan and Richard C Adam, "Financial Reporting Obligation In Accordance with

Selain itu, jasa layanan keuangan yang berbasis teknologi atau teknologi keuangan perlu diatur mengenai lembaga yang akan mengawasi dan mengatur industri ini. UU No. 21 Tahun 2011 tidak mencamtungkan wewenang OJK mengenai pengaturan industri teknologi keuangan.¹³ Pengaturan industri keuangan memerlukan sebuah lembaga khusus atau peganturan khusus¹⁴. UU No. 4 Tahun 2023 telah memasukkan teknologi keuangan sebagai bagian daripada wewenang OJK. Sebelum UU No. 4 Tahun 2023, landasan pengawasan OJK terhadap teknologi keuangan adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/23/PBI/2017 DAN POJK NO. 77/POJK.01/2016¹⁵.

OJK memiliki wewenang penuh dalam pengaturan dan mengawasi sektor jasa keuangan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 dan UU No. 4 Tahun 2023¹⁶. Dalam pengawasan ini, OJK dapat memberikan sanksi peringatan hingga pencabutan ijin usaha lembaga jasa keuangan¹⁷.

Sanksi yang diberrikan oleh OJK bertujuan untuk menciptakannya sebuah industri keuangan yang lebih baik di Indonesia. Sanksi OJK juga bertujuan agar Krisis-krisis akibat kesalahan dalam tata kelola yang salah tidak terulang di Indonesia. Wewenang OJK termasuk sanksi pidana kepada para pihak yang terkait¹⁸.

OJK melakukan pengutan atas para pihak yang berusaha di lembaga keuangan. Pungutan ini menjadi sumber pembiayaan OJK. Pungutan ini

Capital Market Law: An Accountant Dilemma,” *Law Review* XXII, no. 1 (2022): 46–62.

- 13 Femmy Silaswaty Faried and Nourma Dewi, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology),” *Jurnal Supremasi Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2020): 12–22.
- 14 S Johan and S Sugiarto, “Who Should Regulate The Industry of Financial Technology?,” *Pandecta Research Law Journal* 17, no. 1 (2022): 70–77, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/34048%0Ahttps://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/download/34048/13122>.
- 15 Subhan Zein, “Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Landing / Crowdfunding) Di Indonesia,” *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya* 4, no. 2 (2019): 115–124.
- 16 A F Loilewen and T Titawati, “Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan Uu No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Ojk),” *Ganec Suara* (2020): 624–627, <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/145>.
- 17 A Simbolon, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegiatan Perusahaan Asuransi,” *Law Pro Justitia* I, no. 1 (2019): 1–20, <https://122.200.2.179/index.php/lpj/article/view/226>.
- 18 Suwinto Johan, “Sanctions in Financial Services: Developing a Conducive Culture in Financial Industry in Indonesia,” *Humaniora* 13, no. 1 (2022): 9–15.

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014¹⁹. Namun, penggutan OJK telah diamendemen oleh UU No. 4 Tahun 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XII/2014 yang menghapus kata “bebas dari campur tangan pihak lain” dalam pasal 1 angka 1 UU OJK. Sehingga bunyi OJK adalah lembaga yang independent, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan²⁰.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Mengapa Industri Keuangan memerlukan Undang Undang Pengembangan dan Penyehatan Industri Keuangan ?

Apakah Undang Undang No.4 Tahun 2023 efektif mengatasi masalah di industri keuangan ?

PEMBAHASAN

Industri Keuangan memerlukan Undang Undang Pengembangan dan Penyehatan Industri Keuangan

Industri keuangan memerlukan sebuah peraturan yang lengkap terkait dengan aktivitas keuangan yang berkembang pesat, khususnya teknologi keuangan. Banyak peraturan di sektor keuangan yang telah tertinggal dengan perkembangan saat ini. Undang Undang Pasar Modal telah ada sejak 1995, ketika itu, pemesanan, penjualan dan pembelian efek masih menganut sistem mesin ketik dan fax. Sedangkan saat ini, transaksi efek di pasar modal telah mempergunakan aplikasi sistem.

Beberapa industri keuangan belum memiliki sebuah Undang Undang yang menaungi. Industri keuangan seperti pembiayaan masih berdasarkan pada Keputusan Presiden sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi. Teknologi keuangan juga masih belum diatur oleh peraturan yang ada. Hal-hal ini mengakibatkan industri keuangan memerlukan peraturan yang mengatur terkait dengan aktivitas.

19 Ratna Ayu Uspitasari, Imam Koewahyono, and Titik Soeryati Soekesi, “Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Notaris Pemegang Surat Tanda Terdaftar Yang Tidak Pernah Berkegiatan Di Pasar Modal,” *JIPPK* 4, no. 1 (2020): 150–161.

20 Isharyanto and M R F Izzata Laxamana, “Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Negara Independen,” *Res Publica* 1, no. 3 (2017): 26–40.

Industri keuangan memerlukan adanya peraturan yang ketat juga terhadap tindakan kriminal yang banyak terjadi. Kita mengenal beberapa koperasi simpan pinjam yang dipergunakan untuk mengambil dana masyarakat, namun tidak mampu mengembalikan dana masyarakat sehingga mengalami wanprestasi hingga PKPU dan pailit. Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan juga perlu diatur kembali, mengingat Dewan Komisiner OJK memiliki wewenang yang luas terhadap lembaga jasa keuangan. Wewenang OJK perlu ditinjau kembali terkait dengan pengaturan. Wewenang OJK dalam mengatur industri keuangan juga sangat luas dari perbankan, asuransi, pasar modal, teknologi keuangan hingga literasi keuangan masyarakat.

Undang Undang No.4 Tahun 2023 efektif mengatasi masalah di industri keuangan

UU P2SK bertujuan untuk membangun industri keuangan terkait dengan fungsi intermediasi kepada sektor produktif, meningkatkan portfolio pendanaan, literasi jasa keuangan, inklusi keuangan, memperluas sumber pembiayaan jangka panjang, menciptakan industri keuangan yang lebih efisien dan daya asing, mengembangkan instrument keuangan dan mitigasi risiko, perlindungan data pribadi nasabah, memperkuat sistem dan ketahanan sistem keuangan, memperkuat posisi regulator industri keuangan dan meningkatkan daya saing.

Beberapa hal yang diatur dalam UU P2SK belum efektif antara lain adalah wewenang OJK selaku satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang pailit dan PKPU terhadap lembaga jasa keuangan. Hal ini akan menghapus wewenang investor maupun kreditor terhadap lembaga jasa keuangan. Wewenang ini juga tumpangtindih dengan wewenang OJK dalam hal pengawasan. Wewenang akan bertolak belakang dengan wewenang OJK sebagai regulator industri.

Jaminan lembaga penjamin simpanan telah diperluas dengan memasukkan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Definisi simpanan adalah dana masyarakat yang ditempatkan di perbankan. Asuransi tidak menerima dana masyarakat secara langsung, dalam bentuk premi. Premi asuransi bukan merupakan simpanan. Hal ini perlu ditentukan kembali terutama terkait dengan menjamin polis asuransi.

Banyak perusahaan asuransi mengalami pailit akibat kesalahan pengelola manajemen.

Badan pengawas OJK merupakan badan khusus mengawasi dewan komisioner OJK. Dewan ini tidak memiliki wewenang apapun terhadap dewan komisioner. Dewan ini hanya memiliki wewenang mengawasi dan melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan ini tidak akan efektif jika hanya mengawasi. Dewan ini seharusnya diberikan wewenang lebih selain mengawasi.

Penggolongan lembaga jasa keuangan lainnya masih terlalu luas dalam UU P2SK. LJK lainnya meliputi pergadaiaan, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan sekunder perumahan hingga lembaga penyelenggaraan berbasis teknologi. Pengawasan yang komprehensif masih belum diatur secara jelas dalam UU P2SK. Sebuah perbankan memiliki anak perusahaan sebuah bank yang berbasis teknologi, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan dan juga tercatat di Bursa Efek Indonesia. Perbankan tersebut berada di bawah pengawasan dewan komisioner yang mana belum ditentukan.

KESIMPULAN

Undang Undang P2SK telah memberikan banyak perbaikan di industri keuangan. UU P2SK juga memiliki tujuan yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Namun, UU P2SK masih memiliki beberapa hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut terkait dengan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, wewenang dewan pengawas OJK, definisi pengawasan penyelenggara keuangan berbasis teknologi dan lainnya.

Saran

Pembahasan lebih lanjut dapat memasukkan mengenai efek UU P2SK kepada pelaku dunia usaha. Pendapat pelaku usaha terkait dengan UU P2SK merupakan hal yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, Alwi. “Tinjauan Yuridis Upaya Pengajuan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Oleh Nasabah Asuransi.” *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 7, no. 4 (2021): 722–728.

Anggara, Bionda Johan, and Warsifah Warsifah. “Penerapan Hukum Kepailitan Dalam Kaitannya Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Institusi Pengatur Dan Pengawas Perusahaan Asuransi Negara (Contoh Kasus PT. Asuransi Jiwasraya).” *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 4 (2022): 1250–1259.

Diba, Nabilah Farah, Hari Sutra Disemadi, and Paramita Prananingtyas. “Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18, no. 2 (2020): 868–876.

Faried, Femmy Silaswaty, and Nourma Dewi. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology).” *Jurnal Supremasi Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2020): 12–22.

Haryadi, N. “Analisis Kritis Mengenai Legal Standing Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Kresna Life Dalam Perspektif” *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan ...* 1, no. 2 (2021): 124–136. <http://journal.pppci.or.id/index.php/jurisandsociety/article/view/30%0Ahttps://journal.pppci.or.id/index.php/jurisandsociety/article/download/30/20>.

Indraini, Anisa. “Jokowi Sahkan Omnibus Law Sektor Keuangan, Gantikan 17 UU Lama.” *Detik Finance*, 2023. <https://finance.detik.com/moneter/d-6514361/jokowi-sahkan-omnibus-law-sektor-keuangan-gantikan-17-uu-lama>.

Isharyanto, and M R F Izzata Laxamana. “Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Negara Independen.” *Res Publica* 1, no. 3 (2017): 26–40.

Johan, S, and S Sugiarto. “Who Should Regulate The Industry of Financial Technology?” *Pandecta Research Law Journal* 17, no. 1 (2022): 70–77. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/34048%0Ahttps://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/>

article/download/34048/13122.

Johan, Suwinto. "Sanctions in Financial Services: Developing a Conducive Culture in Financial Industry in Indonesia." *Humaniora* 13, no. 1 (2022): 9–15.

Johan, Suwinto, and Richard C Adam. "Financial Reporting Obligation In Accordance with Capital Market Law: An Accountant Dilemma." *Law Review* XXII, no. 1 (2022): 46–62.

Johan, Suwinto, Ariawan Ariawan, and Luo Yuan Yuan. "Insider Trading: Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1995 on Capital Market from Typewriters to Digital Era." *Jurnal Hukum Novelty* 13, no. 1 (2022): 13.

Kristianus, Arnoldus. "Presiden Sahkan RUU Penguatan Sektor Keuangan Jadi Undang-Undang." *Investor.Id*, 2023. <https://investor.id/macroeconomics/319035/presiden-sahkan-ruu-penguatan-sektor-keuangan-jadi-undangundang>.

Loilewen, A F, and T Titawati. "Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan Uu No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)." *Ganec Swara* (2020): 624–627. <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/145>.

Musyafah, Aisyah Ayu. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Law, Development and Justice Review* 2, no. 2 (2019): 194–211.

Pratama, Wibi Pangestu. "Tok! Jokowi Sahkan RUU PPSK Jadi Undang-Undang." *Bisnis.Com*, 2023. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230113/9/1617972/tok-jokowi-sahkan-ruu-ppsk-jadi-undang-undang>.

Ridho, Muhammad. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)Abstract." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 19, no. 2 (2020): 292–328.

Simbolon, A. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegiatan Perusahaan Asuransi." *Law Pro Justitia* I, no. 1 (2019): 1–20. <https://122.200.2.179/index.php/lpj/article/view/226>.

Uspitasari, Ratna Ayu, Imam Koewahyono, and Titik Soeryati Soekesi.

“Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Notaris Pemegang Surat Tanda Terdaftar Yang Tidak Pernah Berkegiatan Di Pasar Modal.” *JIPPK* 4, no. 1 (2020): 150–161.

Verayanthi, N. K. J. D., and I. G. A Kurniawan. “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Nasabah Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi.” *Kerttha Semaya* 9, no. 8 (2021): 1465–1475.

Zein, Subhan. “Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Lending / Crowdfunding) Di Indonesia.” *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya* 4, no. 2 (2019): 115–124.

LEGALITAS PRAKTIK KAWIN KONTRAK DI INDONESIA

**MIA HADIATI, MOODY R. SYAILENDRA,
DAN INDAH SITI APRILIA**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

ABSTRAK

Perkawinan merupakan perikatan suci anantara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan memiliki tujuan untuk melanjutkan membangun keluarga yang bahagia dan melanjutkan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga, perkawinan merupakan pertalian suci, sehidup-semati yang kekal abadi. Namun semakin hari, semakin dirasa kesakralan perkawinan semakin menipis. Realitas saat ini menunjukkan kecenderungan manusia pada aktifitas ekonomis dalam mencari kesenangan dan kepuasan. Salah satu bentuknya adalah kawin kontrak, yang akhir-akhir ini semakin marak. Kebutuhan biologis dan tuntutan ekonomi menjadikannya semakin marak dan dianggap sebagai jalan keluar untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan faktor yang menyebabkan maraknya kawin kontrak adalah adanya kebutuhan ekonomis dan adanya anggapan menikah dengan orang asing dapat memperbaiki keturunan. Perkawinan kontrak ini cenderung merugikan pihak perempuan dan keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Tetapi tampaknya hal ini bukan

menjadi penghalang dilaksanakannya kawin kontrak, walaupun Islam sendiri telah mengharamkan praktik kawin kontrak.

Kata Kunci: Perkawinan dan Kawin Kontrak.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Berangkat dari definisi yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral diantara suami dan istri (pria dan wanita) yang diakui legalitasnya oleh Negara dan memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan dapat melegalkan/menghalalkan hubungan seksual di antara pria dan wanita yang melaksanakan perkawinan. Dengan adanya perkawinan, suami dan istri diharapkan dapat menciptakan kebahagiaan dan kelanggengan di dalam keluarga yang dibinanya, sehingga di dalam perkawinan diperlukan adanya kasih sayang yang sungguh-sungguh serta komitmen diantara suami dan istri dalam membangun hubungan pernikahan. Pada umumnya, perkawinan dilaksanakan atas dasar saling mencintai. Rasa cinta inilah yang kemudian menjadi pendorong seseorang untuk berkomitmen membangun rumah tangga.

Pada umumnya, perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan istimewa, hal ini dikarenakan anggapan masyarakat yang menginginkan

1 Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada mulanya UU Perkawinan dimaksudkan untuk mengodifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional, disamping mengunifikasikan hukum perkawinan. Akan tetapi setelah disahkan, bukan hukum perkawinan yang bersifat nasional yang tercapai, melainkan kompilasi hukum perkawinan nasional yang bersifat nasional yang belum tuntas dan menyeluruh, sebab Undang-undang Perkawinan masih merujuk dan memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan yang lama yang ada sebelumnya, termasuk ketentuan hukum adat dan hukum agama atau kepercayaan masing-masing yang mengatur mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Rumusan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-undang Perkawinan mencerminkan teknik kompilasi hukum sebagai modifikasi pelaksanaan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional

perkawinan yang terjadi sekali seumur hidup saja. Sehingga dapat diartikan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang kekal dan abadi, tidak lekang oleh waktu, dan tentunya tidak dibatasi oleh jangka waktu yang ditentukan oleh masing-masing pihak yang melaksanakan perkawinan. Sehingga, tidak heran jika di Indonesia perkawinan dijadikan sebagai suatu prosesi yang istimewa, bahkan masyarakat rela mengeuarkan biaya yang sangat besar untuk mengadakan prosesi perkawinan. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa perkawinan dianggap sebagai hal yang sangat penting dan bersejarah dalam fase kehidupan manusia.

Melihat fakta-fakta tersebut, serta mempertimbangkan bahwa perkawinan merupakan hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka segala hal yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur sedemikian rupa baik di dalam hukum negara, agama, dan norma masyarakat. Di Indonesia sendiri, sebagai negara yang masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma masyarakat, penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan sangat dikritisi oleh masyarakat. Oleh karenanya, dirumuskanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pelaksanaan perkawinan merupakan peristiwa yang penting, sehingga haruslah dilestarikan. Oleh karena itu, selain harus dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, perkawinan juga harus dicatatkan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berisi:

Pasal 2

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;

Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Tetapi pada perjalanannya, meskipun sudah ada peraturan mengenai hukum dan syarat melakukan perkawinan, baik secara agama dan pemerintahan, masih saja ada individu yang melaksanakan perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah dibuat. Salah satu bentuk pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan

syarat dan ketentuan yang telah dibuat adalah kawin kontrak.

Di dalam Hukum Islam, kawin kontrak dinamakan *mut'ah* yang secara etimologis diartikan sebagai kenikmatan dan kesenangan, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk memperoleh kesenangan seksual, selain itu, menurut *syara' mut'ah* adalah seorang laki-laki mengawini wanita dengan imbalan harta (uang) dengan batas waktu tertentu. Dalam perkawinan *mut'ah*, masa perkawinan akan berakhir dengan tanpa adanya perceraian dan tidak ada kewajiban bagi suami untuk menafkahi sang istrinya. Hal ini tentunya berdampak buruk serta merugikan pihak istri dan juga keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Di Indonesia sendiri praktik kawin kontrak diperkirakan telah berlangsung lama. Salah satu tempat yang marak dijadikan sebagai tempat praktik kawin kontrak adalah Kawasan Puncak. Selain memiliki daya Tarik wisata alam yang memiliki keindahan alam dan kesejukan udaranya, Kawasan Puncak dikenal sebagai tempat maraknya terjadi praktik kawin kontrak. Hal ini diketahui setelah beberapa waktu lalu dilakukan *sweeping* oleh aparat setempat.² Terdapat banyak faktor yang mengakibatkan maraknya terjadi kawin kontrak di Indonesia. Salah satu faktornya adalah faktor ekonomi, meskipun banyak dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kawin kontrak praktik ini tetap marak dilakukan. Bahkan banyak orang tua dari pelaku kawin kontrak yang mendukung dikarenakan ingin sang anak memiliki kehidupan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan nilai kontak dan mas kawin yang diberikan dinilai tinggi, sehingga para pelaku beranggapan beruntung karena dapat memiliki kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang faktor-faktor, akibat, serta legalitas Kawin Kontrak di Indonesia. Untuk itu penulis mengambil judul “Legalitas Praktik Perkawinan Kontrak di Indonesia”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dirumuskan beberapa

2 Putra Ramadhani: Polisi Bongkar Praktik Kawin Kontrak di Puncak Bogor <https://megapolitan.okezone.com/read/2019/12/24/338/2145446/polisi-bongkar-praktik-kawin-kontrak-di-puncak-bogor>

Diakses 20 Januari 2020

permasalahan sebagai berikut : Bagaimakah akibat kawin kontrak menurut aturan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Bagaimanakah legalitas praktik kawin kontrak di Indonesia?

PEMBAHASAN

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Mengenai syarat-syarat perkawinan, diatur di dalam Pasal 6 – 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Syarat-Syarat perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil.³ Syarat materiil berkaitan dengan para pihak yang melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil berkaitan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan.

Syarat-Syarat materiil terdiri dari:

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan);

Harus mendapatkan izin dari kedua orang tua jika masing-masing calon belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan);

Kedua mempelai harus berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melaksanakan perkawinan (Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan);

Kedua mempelai dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan);

Bagi seorang perempuan yang akan melakukan perkawinan kedua kali atau seterusnya, Undang-Undang mensyaratkan telah melewati masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya

3 R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, *Airlangga University Press*, 1988. Hlm 39.

karena perceraian dan 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena ditinggal mati (Pasal 10 dan 11 UU Perkawinan);

Pasal 8 UU Perkawinan melarang perkawinan antara dua orang yang:

Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah maupun ke atas;

Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;

Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;

Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Selain syarat-syarat materiil yang telah disebutkan di atas, terdapat juga syarat-syarat formil yang perlu dipenuhi dalam rangka menjalankan perkawinan. Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No. I/1974 direalisasikan dalam Pasal 3 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5 UU Perkawinan);

Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7 UU Perkawinan).

Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:

Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin;

hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8-9)

Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13 UU Perkawinan).

Jika lihat lebih jelas, maka sesungguhnya perkawinan kontrak tidak sesuai dengan aturan-aturan mengenai syarat perkawinan. Kawin kontrak telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun. 1974 karena dalam perkawinan ini tidak dilakukan pencatatan pada pejabat yang berwenang(KUA atau Catatan Sipil) dalam rangka memperoleh kepastian hukumnya melalui surat nikah. Pada dasarnya Kawin Kontrak itu sendiri telah melanggar arti dan tujuan suci dari sebuah perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Thn. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, jadi tidak ada alasan untuk membenarkan dan mengesahkan keberadaannya.

Rukun dan Syarat Nikah dalam Agama Islam

Dalam ajaran agama Islam, menikah merupakan suatu ibadah yang tertera di dalam Al-Quran. Menikah merupakan bersatunya dua insan, antara laki-laki dan perempuan, ke dalam suatu janji suci. Dalam pernikahan menurut ajaran agama Islam, terdapat rukun dan syarat sah nikah. Jika salah satunya tidak ada, maka pernikahan dianggap tidak sah menurut agama. Berikut adalah rukun dan syarat sah nikah menurut agama Islam.

Rukun Nikah

Adanya Mempelai Laki-Laki

Rukun nikah yang pertama adalah adanya mempelai pria. Saat melaksanakan akad nikah, mempelai pria wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan. Berlangsungnya proses akad nikah merupakan proses penyerahan tanggung jawab dari wali kepada mempelai pria.

Adanya Mempelai Wanita

Rukun nikah yang kedua adalah adanya mempelai wanita, yang bersifat halal untuk dinikahi. Selain hubungan darah, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan seorang wanita haram dinikahi, seperti misalnya ketika sedang dalam masa iddah.

Adanya Wali Nikah

Wali nikah untuk mempelai wanita merupakan rukun nikah. Utamanya, wali nikah adalah ayah kandung mempelai wanita. Namun jika ayah kandung telah tiada atau berhalangan sebab kondisi mendesak, yang berhak menggantikan menjadi wali nikah adalah diantaranya: saudara laki-laki seayah, kake dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung ayah (kakak atau adik ayah), dan anak laki-laki dari saudara kandung ayah. Syarat untuk menjadi wali diantaranya: Islam, *Baligh*, Berakal Sehat, Merdeka (bukan bidak), Laki-Laki, dan dapat berlaku adil.

Dalam keadaan tertentu seperti misalnya pengantin wanita tidak memiliki wali, terdapat wali yang dikenal dengan Wali Hakim. Wali Hakim adalah yang menjadi wali seorang wanita yang tidak mempunyai wali, kebolehan wali hakim ini adalah dalam menikahkan wanita yang telah baligh yang sewaktu akad nikah ada dalam kewaliannya.

Pada dasarnya, wewenang wali hakim itu sendiri berada pada urutan terakhir, setelah semua wali yang sah dan asli sudah wafat, atau tidak memenuhi syarat. Selama daftar urutan wali yang asli masih ada dan memenuhi syarat, maka wewenang wali hakim belum ada. Artinya, ketika seorang wanita masih memiliki ayah, kakek, saudara, paman atau sepupu yang memenuhi syarat sebagai wali, maka mereka itulah wali yang sah. Itupun tidak boleh dilangkahi. Misalnya, saudara laki-laki atau paman, dia tidak boleh mengambil alih hak untuk menjadi wali dari ayah kandung, selama ayah kandung masih hidup dan tidak berkenan untuk menikahkan. Demikian antara lain yang dijelaskan dalam laman Rumah Fiqih Indonesia, sebuah laman yang mengedukasi umat Islam dan menyajikan rubrik tanya jawab seputar hukum-hukum syariah dan ilmu fiqih.⁴

4 <http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1179930107&=bolehkah-menikah-dengan-wali-hakim.htm>, diakses pada 14 Juni 2020 pukul 21.00 WIB.

Dua Orang Pria Sebagai Saksi

Pernikahan dianggap sah di mata agama Islam apabila saat ijab Kabul dihadirkan dua orang saksi. Kedua saksi ini pun harus memenuhi enam syarat yaitu berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, berakal, sudah akil balig, adil, dan merdeka. Arti merdeka yang dimaksud adalah tidak berstatus budak atau tawanan dari pihak lain.

Ijab dan Kabul

Sahnya suatu pernikahan dalam agama Islam adalah setelah diucapkannya ijab dan kabul. Ijab kabul diucapkan oleh mempelai pria sebagai pernyataan kesediaan bertanggung jawab atas istrinya.

Syarat Sah Nikah

Kedua Mempelai Beragama Islam

Selain lima rukun nikah, ada lima syarat nikah yang juga penting. Pertama, pernikahan dianggap sah apabila kedua mempelai beragama Islam. Apabila salah satu mempelai tidak beragama Islam dan pernikahan dilakukan dengan tata cara agama Islam, maka dianggap tidak sah.

Mempelai Pria bukan Mahram Bagi Calon Istri

Mempertegas penkelasan rukun nikah ke-2, syarat sah pernikahan dalam agama Islam adalah mempelai pria bukan mahram bagi calon istri. Selain karena ikatan darah, wanita yang termasuk mahram bagi seorang pria juga termasuk mertua, ibu tiri, anak tiri, menantu, cucu, saudara ipar, dan saudara sepersusuan.

Mempelai Pria Mengetahui Wali Calon Istri

Syarat sahnya pernikahan dalam Islam yang ketiga adalah mempelai pria wajib mengetahui wali dari calon istrinya. Sebelum menikah, seorang pria harus kenal betul latar belakang calon istri, agar ia tahu siapa yang kelak menjadi wali nikahnya. Seperti yang sudah dijelaskan pada rukun nikah ke-3, wali nikah seorang wanita bukan hanya ayah kandungnya saja.

Tidak Sedang Berhaji

Berikutnya, pernikahan dalam ajaran agama Islam akan dianggap tidak

sah jika dilakukan saat sedang menunaikan ibadah haji. Meski ibadah haji adalah suatu amalan baik yang besar keutamaannya, namun diharamkan melangsungkan pernikahan di saat sedang berhaji.

Tidak ada Unsur Paksaan

Terakhir, syarat sahnya pernikahan dalam agama Islam adalah tidak ada unsur paksaan baik di pihak mempelai pria maupun wanita. Kedua mempelai harus dalam keadaan sadar dan atas keinginan sendiri saat melangsungkan pernikahan.

Rukun dan Syarat Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak)

Menurut Sachiko Murata, ada empat rukun nikah mut'ah, yakni formula atau ijab dan kabul, orang atau kedua mempelai, periode waktu, dan mahar. Menurut Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip asy-Syaff'i, nikah mut'ah dilaksanakan tanpa wali dan saksi karena tujuan utamanya semata-mata untuk bersenang-senang. Apabila pernikahan bertujuan sebagai regenerasi maka pernikahan dilakukan dengan menghadirkan saksi dan wali. Sebagaimana ditegaskan dalam *Hasyiyah Yannah at-Talibin 'ala Hilli Aljaziri Fath al-Mu'min* karangan Syaikh ad-Dimyati bahwasanya kehadiran saksi dan wali merujuk pada pernikahan daim. Namun, seorang wanita diperbolehkan melakukan ijab kabul dengan cara mewakili kepada walinya⁵ atau kepada orang lain.⁶ Ada juga yang menyatakan bahwa nikah mut'ah dapat dilaksanakan dengan kehadiran wali yang sah dan saksi sebagaimana dalam nikah permanen. Seorang gadis yang akan melakukan nikah mut'ah harus mendapat izin dari walinya.⁷ Keempat rukun nikah mut'ah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, nikah mut'ah memerlukan pernyataan dan penerimaan (ijab dan kabul). Menurut asy-Sayyid al-Murtada, seperti dikutip Sachiko Murata (murata), budak wanita bisa memakai formula "*aku mengizinkan engkau atau, aku telah menghalalkanmu*" seperti dikemukakan al-Muhaqqiq al-Hilli yang dikutip Murata. Namun, menurut asy-Syahid at-Tani,

5 Ibnu Mustafa, *Perkawinan Mutab dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini*, 2002, Jakarta, Lentera, hlm. 82.

6 A. Syaraf ad-Din al-Musawi, *Isu -Isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syah, terj. Mukhlis B.A.*, 2002, Bandung: Mizan, hlm. 88.

7 Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 2006, Kencana. hlm. 100

sebagaimana dikutip Murata, beliau memilih formula “*aku memberikan milikku kepadamu, atau aku sewakan diriku untukmu*”, dan sebagainya.⁸

Kalimat penerimaan dinyatakan oleh pihak pria setelah wanita mengucapkan kalimat pernyataannya. Penerimaan dari pihak pria tidak disyaratkan harus mendahului pernyataan dari pihak wanita. Menurut al-Muh}aqqiq al-Hilli, apabila pria mengatakan “*aku menikahimu*”, lalu wanita menyatakan penerimaannya, hal itu dibenarkan. Pihak yang menyatakan ijab dan kabul harus pihak yang berwenang, yakni pria dan wanita yang akan melakukan nikah mu’ah, walinya atau wakilnya. Jika akad dilakukan oleh pihak yang tidak berhak maka akad tidak sah.⁹

Kedua, orang. Seorang pria hanya boleh menikahi wanita muslimah yang suci atau Ahli Kitab dan bukan musuh keluarga Nabi. Bagi pria yang sudah memiliki istri permanen dan ingin melakukan nikah mut,,ah dengan budak maka ia harus mendapat izin dari istrinya. Apabila budak tersebut milik orang lain, maka ia harus mendapat izin dari tuannya. Seorang pria juga tidak boleh menikahi putri dari iparnya kecuali atas seizin istrinya. Terkait saudara yang tidak boleh dinikahi, sama halnya dengan ketentuan dalam pernikahan permanen.¹⁰ Pada prinsipnya pria yang akan menikahi seorang wanita tidak dibenarkan menanyakan status wanita itu. Juga tidak pantas seorang pria menikahi wanita perawan kecuali atas izin dari ayahnya.¹¹

Ketiga, periode waktu (*mudda*). Apabila periode waktu tidak disebutkan maka akad tidak sah dan tidak berubah menjadi pernikahan permanen. Berbeda halnya dengan asy-Syahid at-Tani, sebagaimana dikutip Murata, bahwa pernikahan dengan periode waktu yang dinyatakan adalah nikah mut’ah, sedangkan pernikahan tanpa periode waktu yang dinyatakan adalah pernikahan permanen.¹² Kedua pihak tidak dibenarkan menetapkan tindakan hubungan seksual dalam akad atau yang semacamnya tanpa menyebut periode waktu. Namun, apabila periode waktu disebutkan bersamaan dengan syarat bahwa pernikahan tersebut

8 Sachiko Murata, *Lebih Jelas tentang Mut’ah: Perdebatan Sunni dan Syah*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso, 2001, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 44- 45.

9 *Ibid*, hlm 33.

10 Sachiko Murata, *Lebih Jelas tentang Mut,,ah*, hlm. 47-48

11 *Ibid*

12 *Ibid*, hlm 57.

hanya akan meminta sejumlah hubungan seksual, maka akadnya sah. Jika pihak pria telah melakukan hubungan seksual sesuai dengan apa yang ditetapkan maka tidak boleh melakukan hubungan seksual lebih lanjut setelahnya, meski periode waktu belum habis.¹³

Keempat, mahar. Dalam nikah mut'ah, mahar menjadi rukun nikah yang harus dipenuhi dan disebutkan dalam akad. Apabila pria mengembalikan masa perjanjian kepada wanita segera setelah akad dan belum terjadi hubungan seksual, maka wanita tersebut harus mengembalikan separuh maharnya seperti perceraian pada pernikahan permanen. Jika telah terjadi hubungan seksual, wanita berhak atas seluruh maharnya.¹⁴ Dalam hal akad yang dilakukan tidak sah sebelum berhubungan seksual, maka wanita tidak berhak atas mahar. Namun, apabila akad yang tidak sah baru diketahui setelah terjadi hubungan seksual, maka wanita tidak memiliki klaim atas mahar tersebut dan dalam keadaan ini dia telah berbuat zina, dan tidak ada mahar dalam perzinahan.

Status Perkawinan

Jika kawin kontrak terjadi, bagaimana statusnya, seperti status perkawinan, pewarisan dan soal anak? Menurut Quraish Shihab, di negara yang mayoritasnya beraliran Syi'ah—aliran yang menerima konsep mut'ah—seperti Iran, status perkawinannya diakui. Bahkan status anak diakui, sehingga otomatis memungkinkan untuk menjadi ahli waris.¹⁵ Namun itu di Iran, bagaimana di Indonesia? Menurut Rifyal, tidak ada akibat hukum apapun dalam perkawinan kontrak. Pasalnya, perkawinan seperti ini menurutnya adalah perzinahan. Masalahnya, praktek kawin kontrak sering ditemukan di dalam negeri. Salah satunya, kasus di kawasan Puncak. Perempuan pelaku kawin kontrak seperti tidak lebih dari sekedar komoditas seks belaka. Kawin kontrak hanya dijadikan alasan dengan menggunakan kedok agama untuk melaksanakan prostitusi terselubung. Selain itu, nasib anak hasil kawin kontrak pun menurut Venny tidak berbeda jauh dengan sang ibu. Hampir pasti si anak tidak akan mendapat warisan apapun. Sete-

13 *Ibid*, hlm 58-60.

14 *Ibid*, hlm 62.

15 Hukum Online: Kawin Kontrak: Antara Agama, Hukum, dan Realita <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15650/kawin-kontrak-antara-agama-hukum-dan-realita?page=3> . Diakses pada 14 Juni 2020, pkl 00.10 WIB

lah selesai masa kontrak. Maka anak akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan.

Lebih lanjut lagi, soal perempuan sebagai pihak yang mempunyai potensi dirugikan lebih besar ini diamini oleh Quraish Shihab. Ia yakin tidak ada satupun perempuan yang tidak ingin, kecuali terpaksa, pernikahannya langgeng. Itu sebabnya jika ada orang tua yang dilamar anak gadisnya maka ia akan berpikir berulang kali untuk menerimanya. Ini berhubungan juga dengan stereotip yang berkembang bahwa perempuan itu ibarat korek api, yang setelah dinyalakan lalu dibuang. Kalaupun pada akhirnya kawin kontrak dilakukan, maka menurut Moqsith Ghazali, hal harus diikuti dengan dibuatnya janji perkawinan. Dalam janji perkawinan tersebut harus diatur soal status perkawinan, jangka waktu termasuk nasib si anak yang bakal lahir.

Akibat Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak)

Secara teoretik, nikah mu'ah memiliki beberapa akibat, yaitu: Pertama, perceraian. Dalam nikah mu'ah tidak ada talak karena pernikahan berakhir dengan sendirinya pada saat berakhirnya batas waktu yang ditentukan atau ketika laki-laki mengembalikan waktu yang tersisa kepada pihak perempuan.¹⁶ Kedua, sumpah. Sumpah tidak ada dalam nikah mu'ah karena sumpah ini berhubungan dengan perceraian yang tidak ada dalam nikah mut'ah. Ketiga, melaknat. Menurut Imam Ja'far, sebagaimana dikutip Murata, dalam nikah mut'ah sumpah tidak berlaku pada gadis budak, wanita non-muslim atau istri dalam nikah mut'ah.

Keempat, Zihar. asy-Syahid at-Tani, at-Tabataba'i, dan al-Muhaqqiq al-Hilli, seperti dikutip Murata, zihar terkait dengan setiap wanita yang sah untuk digauli karena dalam surat al-Mujadalah (58): 2 bersifat umum. Berbeda dengan Syaikh al-Ansari dan Syaikh Muhammad al-Hasan yang berpendapat tidak ada zihar dalam nikah mut'ah karena akibat zihar kembali pada istri atau berakibat pada perceraian.¹⁷

Kelima, warisan. Anak yang dilahirkan dalam nikah mut'ah dapat mewarisi harta ayah dan ibunya sebagaimana dalam nikah da'im.¹⁸ Berbeda

16 *Ibid*

17 *Ibid*, hlm 77-78.

18 Ja'far Murtada al-Amili, *Nikah Mu'ah dalam Islam*, hlm. 19.

dengan apa yang diungkapkan oleh Murata bahwa anak yang lahir dari pernikahan sementara hanya mendapat warisan ayahnya, setengah dari anak hasil pernikahan permanen, sedangkan warisan dari ibunya sama dengan anak dari pernikahan da'im. Antara suami dan istri tidak ada hak saling mewarisi kecuali disebutkan secara khusus dalam akad. Namun, menurut Imam Baqir, keduanya tetap saling mewarisi selama tidak menyebut syarat lain dalam akad.¹⁹

Keenam, periode menunggu (*iddah*). Menurut Syi'ah Imamiyah, wanita yang masih haid, *iddahnya* dua kali haid; wanita yang ditinggal mati suami, *iddahnya* empat bulan sepuluh hari; dan bagi perempuan hamil, *iddahnya* sampai melahirkan. Lain halnya dengan Ja'far Murtada al-Amili. Menurutnya, wanita yang masih haid, *iddahnya* dua bulan, ada pula yang mengatakan satu bulan. Bagi wanita dewasa tetapi tidak pernah haid, *iddahnya* empat puluh lima hari.²⁰ Sementara menurut asy-Syaikh al-Mufid, as-Sayyid al-Murtada, dan beberapa tokoh lain, *iddah* istri yang ditinggal mati suaminya adalah dua bulan lima hari. Apabila jangka waktu nikah mut'ah telah lewat atau sisa waktu dihibahkan kepada istri sedangkan ia dalam keadaan belum dicampuri, maka tidak ada *iddah* baginya sebagaimana istri yang dicerai dan belum dicampuri dalam nikah da'im.²¹

Ketujuh, memperbarui akad. Sebelum waktu yang disepakati berakhir, tidak dapat dilakukan pembaruan terhadap akad, kecuali jika pihak laki-laki mengembalikan sisa waktu kepada pihak perempuan yang menyebabkan berakhirnya pernikahan, barulah keduanya dapat memperbarui akad. Bagi wanita yang menikah kembali dengan pria yang sama tidak berlaku masa tunggu (*iddah*).²²

Kedelapan, status anak. Anak hasil nikah mut'ah diakui sebagai anak sah, walaupun suaminya pernah melakukan *azl*.²³

Kekosongan Aturan

Ketiadaan aturan hukum yang mengatur mengenai kawin kontrak

19 Sachiko Murata, Lebih Jelas tentang Mut'ah, hlm. 79-81

20 Ja'far Murtada al-Amili, Nikah Mut'ah dalam Islam, hlm. 18.

21 Sachiko Murata, Lebih Jelas tentang Mut'ah, hlm. 84-85.

22 *Ibid.*, 87.

23 Ibnu Mustafa, Perkawinan Mut'ah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini, hlm.

dengan segala akibatnya menyebabkan beberapa pihak mendesak agar dilakukannya pembaharuan dalam hukum perkawinan. Ketidadaan pasal yang mengatur soal kawin kontrak mengakibatkan aparat penegak hukum menggunakan jerat hukum lain. Mengambil contoh di kawasan puncak, warga negara asing yang biasanya merupakan pelaku praktik kawin kontrak dijerat dengan peraturan soal keimigrasian. Itu untuk warga negara asing, bagaimana dengan warga lokal, karena pelaku praktik ini tidak melulu warga negara asing. saat ini harus dipikirkan untuk dibuat rancangan undang-undang mengenai kawin kontrak. Pengaturan soal kawin kontrak ini menurut Moqsith Ghazali untuk mencegah dilecehkan dan dirugikannya kaum perempuan.

Pandangan berbeda datang dari Quraish Shihab. Menurut Quraish, Undang-Undang Perkawinan (UU 1/1974) yang ada sekarang sudah cukup baik. Saya tidak melihat ada bagian dari UU tersebut yang harus ditegaskan kembali atau diperbaiki. Menurutnya persoalan mengenai keabsahan kawin kontrak ini dapat terjawab dari salah satu pasal dari UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang berdasarkan agamanya masing-masing.

Praktik Kawin Kontrak di Kawasan Puncak, Jawa Barat

Praktek kawin kontrak yang terjadi di Kawasan Puncak sering kali dijadikan alasan untuk mendapatkan nafkah. Jika dilihat dari kasus-kasus yang mencuat di media massa, dapat dilihat jika sebenarnya para perempuan pelaku kawin kontrak bukanlah wanita baik-baik, dalam artian menjaga kesuciannya. Para pelaku kebanyakan adalah wanita pekerja seks komersil (PSK), yang menjadikan hubungan seksual sebagai mata pencahariannya.

Praktek kawin kontrak ini dimulai dengan para pelaku laki-laki yang memesan wanita yang diinginkan melalui penjaga villa, supir travel, tukang ojek atau petugas penjaga keamanan. Setelah terjadi kesepakatan, sang perantara akan mengantarkan wanita tersebut. Kawin kontrak yang berlangsung di Kawasan Puncak dilakukan dengan dihadiri kedua mempelai, ijab kabul, mahar, dan batas waktu yang disepakati bersama. Jumlah mahar ditentukan sesuai masa kontrak yang disepakati kedua pihak. Selain itu, terdapat juga pelaksanaan yang dihadiri wali dan saksi, baik wali yang sah maupun wali bayaran. Apabila habis masa kontrak

mereka tidak menjalani masa iddah dan mereka diperbolehkan melakukan akad baru dengan orang lain segera setelah masa kontrak habis dengan suami kontrak yang pertama.

Status Kawin Kontrak

Perkawinan, utamanya dalam agama Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi dan akan menjadi tidak sah perkawinan tersebut jika tidak dipenuhi salah satunya. Praktek Kawin Kontrak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini terjadi dikarenakan kebanyakan kawin kontrak dilaksanakan tanpa adanya wali yang sah, penghulu, maupun pejabat yang memiliki wewenang dalam melakukan pencatatan, selain itu pada kawin kontrak dinyatakan batas waktunya. Lebih parahnya lagi, banyak praktek kawin kontrak yang hanya dilakukan oleh kedua pihak, sang laki-laki dan perempuan saja yang melakukan akad nikah.

Dalam Islam dikenal beberapa pernikahan yang dilarang termasuk nikah mut'ah, meskipun pada masa permulaan Islam diperbolehkan. Hanya golongan Syi'ah yang masih memperbolehkan nikah mut'ah sampai sekarang. Apabila melihat rukun dan syarat nikah mut'ah yang berlaku dalam kelompok Syi'ah, pelaksanaan kawin kontrak terkadang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Karena, perkawinan dilakukan dengan menghadirkan wali bayaran sebagai wakil dari pihak wanita, dua saksi dan penghulu bayaran pula. Padahal, dalam rukun nikah mut'ah tidak membutuhkan wali bagi wanita yang sudah dewasa, saksi, dan penghulu. Namun, cukup dengan dua orang yang berakad, mahar dan ijab kabul yang di dalamnya menyatakan secara tegas masa kontrak yang akan dijalani. Dalam hal ini, kawin kontrak tidak sesuai dengan pelaksanaan nikah mut'ah. Di antara alasan keharaman nikah mut'ah menurut mayoritas ulama berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, ijma', ketetapan Khalifah Umar bin Khattab, dan juga karena bertentangan dengan tujuan perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warohmah*. Kehidupan keluarga yang *sakinah* tidak akan mungkin didapatkan pada perkawinan yang dilaksanakan dalam sementara waktu. Dilaksanakannya perkawinan seakan-akan hanya untuk memuaskan nafsu semata, karena dalam kawin

kontrak seorang laki-laki dapat mengawini beberapa perempuan tanpa ada batasan dalam satu waktu.

Kedua, perkawinan bertujuan untuk regenerasi/reproduksi. Dalam kawin kontrak, regenerasi tidak selamanya dapat terwujud karena tidak ada batasan waktu minimal dalam kawin kontrak sehingga kecil kemungkinan untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas. Anak yang dihasilkan dalam pernikahan sudah seharusnya mendapat asuhan dan didikan dari kedua orang tuanya. Namun, dalam kawin kontrak seorang ayah sering kali meninggalkan anaknya ketika masa perkawinan telah habis sehingga mantan istri akan menjaga dan mendidik anaknya seorang diri.

Ketiga, tujuan perkawinan adalah untuk pemenuhan kebutuhan biologis. Layaknya perzinaan yang mengatasnamakan perkawinan, tujuan utama kawin kontrak adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis. Alasan pihak laki-laki yang melakukan kawin kontrak dengan pekerja short time, sebagaimana dikemukakan dalam hasil wawancara, adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina.

Keempat, perkawinan bertujuan menjaga kehormatan. Dalam kawin kontrak, wanita dapat berpindah dari laki-laki satu kepada yang lainnya. Karena, ketika masa kontrak selesai dengan laki-laki pertama, wanita itu dapat langsung melakukan kawin kontrak dengan laki-laki lain tanpa harus melalui masa tunggu.

Kelima, tujuan perkawinan adalah untuk ibadah. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan yang lalu bahwa ikatan perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh dan bernilai ibadah. Sudah sepantasnya ikatan yang kokoh tersebut dijaga oleh pasangan yang mengikatkan diri dalam tali perkawinan tersebut. Hal ini jauh dari pelaksanaan kawin kontrak, sebab akad perkawinan hanya dijadikan formalitas agar kedua belah pihak dapat melakukan hubungan seksual dalam ikatan yang dianggap sah. Tidak ada tujuan untuk menjaga tali perkawinan di antara mereka, bahkan akad perkawinan hanya dimaksudkan untuk kesenangan sesaat.

Undang-undang perkawinan Indonesia juga mengatur rukun dan syarat nikah yang hampir sama dengan aturan dalam hukum Islam. Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa sahnya perkawinan apabila dilaksanakan sesuai agama masing-masing. Dalam UUP tidak dikenal adanya nikah

mut'ah. Namun, di dalamnya memuat aturan bahwa pernikahan bertujuan untuk selamanya bukan untuk sementara waktu. Meskipun secara tidak langsung nikah mut'ah dilarang dalam undang-undang perkawinan, pelaksanaannya tetap saja tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan, bahkan bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dinyatakan untuk selamanya. Demikian halnya dalam kawin kontrak, perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta terbatas pada waktu yang disepakati. Hal ini bertentangan dengan UUP.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa status kawin kontrak adalah tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh hukum Islam atau UUP. Kawin kontrak juga bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an. Walaupun di sisi lain disebutkan bahwa nikah mut'ah merupakan solusi bagi yang tidak mampu melakukan nikah permanen,⁸² hal ini tidak dapat diterapkan pada kawin kontrak karena tidak adanya kesesuaian dalam aturan pelaksanaan antara nikah mut'ah dengan kawin kontrak. Di samping itu, apabila kawin kontrak diperbolehkan akan mengurangi kesakralan makna perkawinan.

Akibat Kawin Kontrak

Ada persoalan-persoalan menarik terkait akibat kawin kontrak, yaitu:

Tentang perceraian, sebagaimana nikah mut'ah, dalam kawin kontrak berakhir ketika masa yang telah ditentukan atau disepakai berakhir tanpa ada kata;

Sumpah. Pihak perempuan yang melakukan kawin kontrak tidak mengetahui hal itu;

Melaknat. Demikian halnya sumpah lian²⁴, wanita yang melakukan perkawinan kontrak tidak mengetahui persoalan ini. Sehingga

24 Kata lian diambil dari kata la'n (laknat atau kutukan). Orang yang mengambil sumpah lian mengatakan pa da sumpahnya yang kelima. "Bahwasanya laknat Allah atas diriku sekiranya aku termasuk orang-orang yang dusta". Kalimat ini diambil dari QS anNur ayat 69. ". Dan mereka yang melempar tuduhan (berzina) kepada istri-istri mereka, sedangkan mereka tak mempunyai saksisaksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian seseorang di antara mereka itu adalah: empat kali bersumpah dengan nama Allah. Bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang berkata benar. Dan (sumpah) kelima bahwa laknat Allah atas dirinya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Dilansir dari buku Panduan

dimungkinkan bahwa sumpah lian tidak terjadi dalam kawin kontrak.

Zihar²⁵. Wanita yang melakukan kawin kontrak tidak memberikan keterangan terkait ada atau tidaknya zihar;

Warisan. Dari penelitian yang dilakukan, belum ada keterangan secara pasti mengenai ada atau tidaknya saling mewarisi dalam perkawinan kontrak yang terjadi. Hal ini terjadi karena kebanyakan perkawinan berakhir sebelum adanya salah satu pihak yang meninggal. Sehingga, pewarisan tidak terjadi di antara keduanya. Demikian halnya pewarisan antara bapak atau ibu dengan anak yang dihasilkan dari perkawinan kontrak tersebut. Sejauh penelitian ini dilakukan, belum ada proses pewarisan yang terjadi karena mereka semua masih hidup;

Periode menunggu (iddah). Periode menunggu (iddah) tidak berlaku pada kawin kontrak yang terjadi di Desa Tugu Utara. Karena, apabila waktu kontrak telah berakhir dengan suaminya, mantan istri bisa langsung melakukan akad kawin kontrak dengan lakilaki lain;

Ketujuh, pembaruan akad. Dalam kawin kontrak, tidak ada keterangan mengenai ada atau tidaknya proses untuk memperbarui akad apabila masa kontrak selesai. Hal ini disebabkan oleh kawin kontrak yang terjadi, apabila habis masa kontrak mereka langsung berpisah;

Status anak. Status anak yang dilahirkan dalam perkawinan kontrak tidak dapat diakui sebagai anak sah, baik menurut aturan dalam nikah

Lengkap Muamalah karya Muhammad Bagir, lian bisa dilakukan dalam dua keadaan. Pertama, apabila seorang suami menuduh istrinya telah berzina. Sedangkan, dia tidak mempunyai empat orang saksi yang melihat sendiri perbuatan itu dan bersedia bersaksi bahwa si istri memang telah melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, si suami dibolehkan melakukan lian terhadap istrinya hanya jika dia benar-benar yakin bahwa istrinya telah berzina. Misalnya, dengan menyaksikan sendiri perbuatan itu ataupun si istri mengakuinya. Sementara dia benar-benar percaya akan pengakuan istrinya itu. Meski demikian, yang lebih utama dalam keadaan ini adalah menjatuhkan talak kepada istri dan tidak perlu melakukan lian. Di samping itu, suami dilarang melempar tuduhan berzina kecuali dalam keadaan dia benar-benar yakin istrinya berzina.

- 25 Zihar adalah suami menyerupakan istri dengan perempuan mahram dinikah baik mahram karena nasab seperti ibu, saudara perempuan kandaung, bibi; atau mahram karena perkawinan seperti ibunya istri; atau mahram karena sesusuan (radha'ah). Hukum zihar adalah haram dan pelaku zihar harus membayar kafarat atau tebusan agar dia kembali dapat melakukan hubungan intim dengan istrinya. Dari segi pengucapan (sighat) zihar ada dua macam yaitu zihar sharih (jelas/eksplisit) dan dhihar kinayah (kiasan / implisit). Sebagaimana talak, zihar sharih tidak memerlukan niat. Sedangkan zihar kinayah memerlukan niat. Perkataan suami pada istri: "Engkau haram bagiku" bisa disebut zihar kinayah kalau diniati zihar. Bisa berarti talak kalau diniati talak.

mut'ah di kalangan Syi'ah maupun undang-undang yang berlaku. Karena, kawin kontrak yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan di atas.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kawin kontrak tidak memiliki akibat hukum apa pun sebagaimana pernikahan yang sesungguhnya. Kawin kontrak terlihat hanya sebagai pelindung praktik prostitusi yang mengatasnamakan agama.

PENUTUP

Kesimpulan

Kawin kontrak atau kawin mut'ah yang banyak dikenal di beberapa daerah di Indonesia adalah perkawinan di bawah tangan yang dilakukan dua calon pengantin dengan perjanjian dalam suatu waktu tertentu. Karena dilakukan di bawah tangan, maka perkawinan ini tidak didaftarkan ke instansi berwenang.

Dalam hukum nasional, kawin kontrak sebenarnya tidak diperkenankan, karena sebagaimana ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.”

Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Artinya, jika perkawinan dilakukan tidak berdasarkan agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak, maka secara hukum tidak akan diakui keabsahannya.

Ketentuan agama dalam hal ini tidak hanya diberi pengertian terpenuhinya syarat-syarat konkrit seperti adanya dua calon mempelai, persetujuan orang tua, maupun mahar, dan lain-lainnya, tetapi juga harus terpenuhinya tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karenanya, status kawin kontrak dilihat dari pemenuhan rukun

dan syarat perkawinan sebagaimana dalam KHI dan undang-undang perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah. Karena tidak memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Hal ini disebabkan kawin kontrak terkadang dilakukan hanya dengan dua orang yang melakukan akad tanpa dihadiri wali dan saksi, terkadang juga dilakukan dengan dihadiri wali yang tidak memenuhi syarat. Pelaksanaan kawin kontrak bertentangan dengan tujuan perkawinan karena hanya mementingkan penyaluran kebutuhan biologis semata dan tidak sesuai dengan status ikatan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, yakni merupakan ikatan yang suci dan kokoh, yang harus dijaga oleh pasangan yang mengikatkan diri di dalamnya. Hal ini tidak akan ditemukan dalam kawin kontrak, karena kawin kontrak layaknya prostitusi terselubung yang mengatasnamakan agama.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan sebelumnya, peneliti mencoba memberikan saran, utamanya bagi para pihak yang terlibat di dalam Praktek Kawin Kontrak.

Pelaku Wanita

Hendaknya para wanita lebih bisa memahami betapa sakralnya nilai sebuah perkawinan. Disamping itu, diharapkan para wanita dapat menginternalisasi dan menjalankan nilai-nilai agama yang diyakininya dalam kehidupan sehari-hari.

Keluarga

Keluarga adalah tempat pendidikan utama dan pertama bagi seorang anak. Untuk itulah diharapkan peran keluarga, orangtua khususnya agar mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai agama bagi putra-putrinya sejak dini. Selain agama, pendidikan moral dan budi pekerti sesuai nilai-nilai pancasila pun dibutuhkan agar anak memahami hukum yang berlaku di masyarakat, agama maupun negara.

Peneliti

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai

fenomena lain yang berkaitan dengan praktek kawin kontrak di Kawasan Puncak, Jawa Barat dan menemukan jaringan yang ikut andil dalam bisnis kawin kontrak. Peneliti menyadari bahwa dalam studi ini, belum menggambarkan latar belakang terjadinya kawin kontrak secara mendalam. Selain itu peneliti juga mengharapkan pengoptimalan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik kawin kontrak di Kawasan Puncak, Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Rahman Ghozali, 2003. *Fiqh Munakabat*. Prenada Media Group: Jakarta.

Ali Afandi, 2000 *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.

Amili, Ja'far Murtada al-, 1992, *Nikah Mut'ah dalam Islam: Kajian Ilmiah dari Berbagai Mazhab*, terj. Abu Muhammad Jawad, Yayasan As-Sajjad: Jakarta.

Amiur Nurudi, Azhari Akmal, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana: Jakarta.

Fachrudin, Fuad Muhammad, 1992, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Pedoman Ilmu Jaya: Jakarta.

Hazairin, 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas: Jakarta

Ibrahim Hosen, 1971 *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin: Jakarta.

Mohd. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara: Jakarta.

Murata, Sachiko, 2001, *Lebih Jelas tentang Mut,,ab: Perdebatan Sunni dan Syiah*, Terj. Tri Wibowo Budi Santoso, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Ranjit Kumar, 1999, *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. Addison Wesley Longman Australia Pty. Limited. Melbourne.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimet-ri*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Universitas Indonesia Press: Jakarta

Sidek Mohd. Noah, 2002. *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis, Sebuah Buku Mesra Pengguna*, Universiti Putera Malaysia, Serdang.

Syarifudin, Amir, 2009 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakabat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Kitab

Subulus Salam, ash Shan'ani, Darul Kutub Ilmiah

Jami' Abkamu Nisaa' (3/169-170)

Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyiq; Dar al-Fikr, 1989)

Artikel

CintaLia.com: “Kawin Kontrak – Hukum dan Dampaknya”. <https://cintalia.com/cinta/pernikahan/kawin-kontrak>. Diakses pada Senin, 20 Mei 2020.

Hukum Online: Kawin Kontrak: Antara Agama, Hukum, dan Realita <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15650/kawin-kontrak-antara-agama-hukum-dan-realita?page=3>. Diakses pada Minggu, 14 Juni 2020.

BERITA

Okezone. “Polisi Bongkar Praktik Kawin Kontrak di Puncak Bogor”. Diakses pada Senin, 20 Januari 2020. <https://megapolitan.okezone.com/read/2019/12/24/338/2145446/polisi-bongkar-praktik-kawin-kontrak-di-puncak-bogor>

